



**PUTUSAN**

Nomor 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ULIH MUSLIHUDIN, S.H.I., M.M., C.L.A. dan Milda Handayani Awaliyah, SH, MH., Advokat yang beralamat di Kp. Gunung Sumur RT 001 RW 008 Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3418/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

xxxxxxxxxxxxxx umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di : xxxxxxxxxx Kab. Tasikmalaya., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 08 Juli 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Selasa, tanggal 11 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di xxxxxxxx Tasikmalaya;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah Bersama sama mengarungi bahtera rumah tangganya telah dikarunia Keturunan seorang anak Perempuan yang bernama :xxxxxxxxxxx
5. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya yaitu pada usia perkawinan ke-03 (Tiga) Tahun tepatnya sejak bulan Desember 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;
6. Bahwa, Perselisihan dan perkecokan tersebut terjadi karena disebabkan Tergugat sudah tidak menjadi uswah atau contoh bagi Penggugat sebagai kepala rumah tangga, yang pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan dan kesepahaman serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
7. Bahwa, akibat dari terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut Puncaknya sejak awal Bulan Januari 2022, lebih kurang Enam Bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat serta antara penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sampai saat sekarang ini;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di musyawarahkan oleh keluarga agar rukun kembali dalam menjalankan rumah tangganya yang harmonis tapi tidak membuahkan hasil, malah kondisi rumah tangganya semakin memburuk serta banyak madorotnya;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan keadaan menunjukan sebaliknya, seandainya pun rumah tangga dengan Tergugat terus dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya;
10. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di uraikan di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **xxxxxxxx** atas Penggugat **xxxxxxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aquo et bono ).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ULIH MUSLIHUDIN, S.H.I., M.M., C.L.A. dan Milda Handayani Awaliyah, SH, MH., ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 3418/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 08 Juli 2022;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/018/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Kp.xxxxxxxxxxxxxx
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2020 yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxx Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Kpxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2020 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 3418/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 08 Juli 2022, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 April 2017

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2017 dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul)
2. Bahwa sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Desember 2020 bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm





بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا  
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri juga oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 2653/Pdt.G/2022/PA.Tsm